ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban dari tindak pidana perkosaan dan diharapkannya adanya aturan khusus yang mengatur tentang penyandang disabilitas yang menjadi korban dari tindak pidana perkosaan. 2) Untuk memperjelas keaburan hukum yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas yang menjadi korban dari tindak pidana perkosaan di pengadilan sehingga kedepannya tidak ada lagi kekeliruan di dalam aturan yang berlaku. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana perkosaan dalam persidangan. 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk korban penyandang disabilitas yang menjadi korban dari tindak pidana perkosaan dalam putusan nomor. 25/Pid.B/2017/Mbn ditinjau dari aspek keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pembahasan dalam penelitian ini ialah mengadopsi Pasal 178 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pemerintah bersama DPR perlu membuat membuat regulasi khusus yang mengatur tentang penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas yang menjadi korban dai tindak pida perkosaan. Saran dan masukkan pada penelitian ini adalah: 1) Membuat serta membentuk sebuah regulasi khusus tentang penyandang disabilitas yang menjadi korban dari tindak pidana perkosaan, serta pengaturan hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. 2) Mengadopsi ketentuan Pasal 178 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas agar mendapatkan kepastian hukum mengenai hak penyandang disabilitas untuk memperoleh penerjemah serta mempunyai kepastian hukum di peradilan untuk terpenuhinya hak untuk mendapatkan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Perlindungan Hukum, dan Perkosaan.